

# KKN dan Upaya Penanganannya

## Sebuah Kajian Kultural-Religius

Ebenhaizer Nuban Timo

### *Abstract*

*This paper deals with Corruption, Collusion and Nepotism which become very deteriorate habits in many developing countries in Asia, especially Indonesia. It shows various negative effects of corruption for building a community of peace and justice for all. Within this paper, the author also tries to make some remarks about the reasons why corruption is practiced by many people eventhough they are aware of its destructive impacts. Among the reasons mentioned in this paper, the author makes a long explanation on sociological and theological reasons. Question as to how to get rid of a society from corruption, collusion and nepotism forms an important part of this paper. The author argues that these deteriorate habits can not be totally eliminated. It can only be reduced. Education, according to the author, plays a substansial role in reducing these problems.*

**Keyword:** *Corruption, Collusion and Nepotism*

### 1. Latar Belakang Permasalahan

Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan sebuah realitas sosial yang menduduki peringkat cukup tinggi dalam grafik perekonomian negara-negara maju maupun yang sedang berkembang. Pada satu sisi KKN dianggap sebagai skandal, dosa dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tetapi di sisi lain ia dicintai dan dielu-elukan. Pelaku KKN sering dianggap sebagai penjahat, tetapi juga pahlawan. Ini nampak dalam perlakuan khusus dari negara kepada para koruptor.

Di Indonesia fenomena KKN bahkan sudah dianggap sebagai sebuah budaya.<sup>1</sup> Disebut sebuah budaya karena korupsi di Indonesia dilakukan secara berjemaah, bukan lagi orang per orang. Bukan hanya pejabat dan kaum terpelajar, orang dari kelas bawah pun banyak yang melakukannya. Perlakuan terhadap koruptor di Indonesia juga terbilang istimewa. Kepada mereka disiapkan seragam khusus, juga perawatan

---

<sup>1</sup> Mujiburrahman, *Sentilan Kosmopolitan* (Jakarta: Penerbit Kompas. 2013), 131.

kesehatan dengan biaya ditanggung pemerintah kalau selama pemeriksaan mereka jatuh sakit. Ini beda dengan tahanan untuk kasus kejahatan lain, padahal koruptor itu jelas punya banyak duit. Setelah ternyata bersalah dan divonis hukuman penjara, kepada mereka sering berlaku kebijakan *potong masa tahanan*. Jadi, berbicara tentang Indonesia tanpa menyoroti KKN ibarat mengenal Indonesia secara *premature*.<sup>2</sup>

Ungkapan yang sering dipakai untuk menggambarkan fenomena KKN di Indonesia ialah seperti sebuah *gurita* yang telah masuk sampai kepada semua sektor kehidupan, tidak ketinggalan sektor keagamaan. Bahkan korupsi terjadi juga di kementerian agama RI pada masa menteri Al-Munawar.<sup>3</sup> Praktek ini punya pengaruh juga pada pola investasi dalam perusahaan dan juga investasi dalam negeri.

Dari segi keagamaan, KKN juga merusak mental dan akhlak manusia dan para pelaku pendidikan dan lembaga-lembaga penjaga pagar moral dan etika (kehakiman, Kejaksaan, polisi dan alim ulama). Di penghujung tahun 2013 bangsa Indonesia dikejutkan dengan tertangkapnya beberapa politisi bahkan juga jaksa dalam berbagai kasus suap. Yang mengejutkan adalah kasus suap yang menimpa ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, tokoh dalam lembaga yang diharapkan menjadi benteng terakhir dari penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih.

Dalam banyak diskusi interaktif dan opini di media masa, para pelaku KKN disebut sebagai manusia yang hati nuraninya sudah mati. Betapa tidak, banyak anak negeri ini yang menderita busung lapar, korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas akibat fisik jalan yang tak terurus, dan masih banyak contoh tragis lain. Semua itu punya hubungan dengan perampokan dana pembangunan oleh para koruptor tadi. Kematian hati nurani memang lebih menakutkan dari kematian dalam arti medis. Karena KKN merupakan fenomena yang mencolok, studi tentang praktek ini juga banyak dan menarik untuk ditelaah. Sekurang-kurangnya ada dua aliran studi dan *research* yang berhubungan dengan fenomena KKN. Yang pertama berminat melihat praktek korupsi di negara-negara di dunia. Di sini korupsi didefinisikan dalam terminologi ekonomi.<sup>4</sup> Yang kedua mendefinisikan korupsi dalam terminologi budaya nasional.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Christopher J. Robertson & Andrew Watson, *Korupsi dan Perubahan Nilai* (1999).

<sup>3</sup> Pos Kupang: Suara Nusa Tenggara Timur 20 Desember 2005

<sup>4</sup> Shleifer & Vishny, dalam Christopher J. Robertson at.al. (1993), 200.

<sup>5</sup> Wines & Napier, dalam Christopher J. Robertson at. al. (1992)

KKN di Indonesia dilihat sebagai yang bersangkutan paut dengan budaya dan adat istiadat masyarakatnya, yakni hubungan kekerabatan.<sup>6</sup> Pada satu sisi kekerabatan berguna untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mendorong prestasi dan efektivitas kerja. Ini terutama dalam masyarakat agraris mengandalkan gotong royong. Tetapi kekerabatan berpotensi KKN kalau diterapkan dalam masyarakat industri dan teknologi. Satu orang bekerja, tetapi yang makan dalam seluruh famili.

Akhir-akhir ini ada aliran ketiga yang menyatukan dua yang pertama dan sangat relevan dengan pengambilan keputusan strategis. Aliran itu kita sebut *hard economic* dan *soft culture*. Tulisan ini memfokuskan diri pada fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengaruhnya pada budaya bangsa. Titik tolak diagnosa akan dilihat dari perspektif agama dan nilai-nilai moral.

## 2. KKN dan Faktor-faktornya

Ada banyak definisi korupsi. Tapi satu ini yang sejalan dengan maksud tulisan kita. Korupsi adalah penyalahgunaan peran dan *resources* publik untuk keuntungan pribadi atau pemanfaatan fasilitas *office* untuk hal-hal *non office*.<sup>7</sup> Dalam dunia bisnis modus korupsi paling dominan adalah *bribery* (suap), *extortion* (menyalahgunakan otoritas) dan *embezzlement* (mencuri sesuatu yang menjadi hak atau yang diberikan kepada orang lain).

Fenomena *extortion* (menyalahgunakan otoritas) dan *embezzlement* (mencuri sesuatu yang menjadi hak atau diberikan kepada orang lain) paling banyak terjadi di kalangan para birokrat (pemimpin masyarakat: pejabat-pejabat). Sedangkan *bribery* (suap) berlaku di kalangan terbatas: antara pengusaha, penguasa dan penegak hukum (jaksa, polisi, dan hakim). Singkatnya, grafik tertinggi dari korupsi terjadi di sektor pemerintahan, dan dilakukan oleh mereka-mereka yang diangkat melalui sumpah jabatan, pakai penumpangan tangan di atas kitab suci dan menerima doa pengukuhan.<sup>8</sup> Kalau menggambarkan fenomena ini kita bisa samakan korupsi dengan perbuatan onani dan masturbasi karena sering dilakukan sendiri-sendiri dan sembunyi-sembunyi.

---

<sup>6</sup> Kartodirdjo, *Korupsi dan Moralitas Bangsa* (Jakarta: Yayasan Obor. 1981), 14.

<sup>7</sup> Getz and Volkema, dalam Christopher J. Robertson at.al, *Korupsi dan Perubahan Nilai* (2001: 9)

<sup>8</sup> Survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia di tahun 2008 memberi hasil yang mengejutkan. Kota Kupang berada dalam peringkat pertama kota terkorup di Indonesia. Padahal mayoritas pejabat di daerah itu adalah penganut agama kristen yang setiap hari minggu pastilah mengucapkan rumusan doa: Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Lihat Pos Kupang, 26-1-2008, 14.

Kolusi artinya bekerja sama. Tapi bekerja sama yang satu ini sudah jatuh harga. Karena itu istilah sinonim untuk kolusi adalah persekongkolan untuk meraih kepentingan kelompok dengan memanfaatkan fasilitas umum, milik bersama. Nepotisme. Ini berasal dari bahasa latin *nepos* yang berarti keturunan atau anak cucu.<sup>9</sup> Akhiran *isme* menunjuk pada perilaku dan keputusan seseorang kecenderungan mengemukakan soal keturunan atau mengutamakan pertalian keluarga. Orang Cina punya peribahasa: "Satu orang mencapai posisi pejabat, anjing-anjing dan ayam-ayamnya ikut naik pangkat."<sup>10</sup>

Ada banyak faktor yang melatar-belakangi terjadinya KKN. Kita mencatat faktor *pertama* adalah budaya. Ide bahwa orang yang mempunyai kekuasaan seharusnya menerima hadiah dan sebagai balasannya dia harus melakukan seperti yang dikehendaki pemberi hadiah bukan sebagai sebuah pelanggaran hukum adat. Karena adat ini, KKN sering dianggap sebagai hal yang lumrah.

Kita sebut misalnya pungutan biaya sebelum menerima surat rujukan ke rumah sakit, hadiah kepada sekretaris di meja pertama untuk menajamkan pensil sekretaris, pengenaan biaya obat oleh dokter yang sudah dibayar oleh pemerintah, penyogokan kepada dewan agar dimenangkan tendernya, atau menyogok penguji di universitas agar meluluskan mahasiswa. Menunda-nunda tugas administrasi untuk menerima dana insentif dari klien yang ingin dipercepat urusannya, dst.

Satu fenomena menarik dari faktor budaya ini terdeteksi dalam budaya di mana penulis dibesarkan, yakni budaya suku *meto* (lebih populer orang Timor) di pulau Timor - Nusa Tenggara Timur. Dalam kosa kata bahasa lokal, bahasa suku *meto* (*uab meto*)i tidak ada kata khusus untuk terima kasih. Secara sepintas orang lalu bisa mengatakan bahwa suku *meto* adalah komunitas yang tidak tahu berterima kasih. Penilaian seperti itu dangkal. Kalau suku *meto* tidak memiliki kata terima kasih dalam khasanah bahasanya, itu tidak berarti orang *meto* tidak tahu berterima kasih.

Terima kasih bagi komunitas suku *meto* bukan sesuatu untuk diucapkan, melainkan dilakukan. Ungkapan terima kasih dari suku *meto* dinyatakan bukan secara verbal tetapi dalam tindakan, yakni memberi sesuatu kepada orang yang menolong atau

---

<sup>9</sup> Prent, Adisubrata, & Poerwadarminta, (1969), 564.

<sup>10</sup> Kartodirdjo, *Korupsi dan Moralitas Bangsa* (Jakarta: Yayasan Obor 1981), 127.

yang diharapkan akan menolong dia keluar dari kesulitan. Pemberian terima kasih itu bisa berupa binatang peliharaan sampai pada pemberian sebidang tanah, bergantung pada kualitas pertolongan yang diterima.<sup>11</sup>

Faktor ini ikut diperkuat oleh, *kedua*, rendahnya upah (gaji) yang diterima oleh para pejabat pemerintah yang tidak sebanding dengan tingginya biaya kebutuhan hidup, seiring dengan lemahnya penegakan peradilan. Sayangnya, yang diperas justru adalah masyarakat dan rakyat biasa, yang hidup tanpa penghasilan yang tetap. Di sinilah kita berhadapan dengan persoalan kematian hati nurani dari para pelaku KKN.

KKN juga punya sangkut paut dengan distoris pemahaman tentang hidup bermasyarakat. Ini faktor *ketiga* penyebab maraknya praktek KKN. Salah satu kontribusi penting dari pemikiran Emil Durkheim bagi pemahaman tentang masyarakat adalah tekanannya pada kehidupan sosial sebagai corak paling mendasar dari kebudayaan manusia. Masyarakat terbentuk karena adanya kontrak sosial. Masyarakat tercipta pertama kali dari dua individu yang sepakat untuk bekerja sama. Kesepakatan yang terbentuk antara mereka bukan hanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi juga melibatkan campur tangan dewa-dewa sebab akibat dari kesepakatan itu akan dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat.<sup>12</sup>

Hal ini berkaitan erat dengan penegasan Durkheim yang berbicara tentang masyarakat sebagai *fakta social*. Di sini Durkheim berbicara tentang kepemilikan. Sistem kepemilikan yang pertama kali muncul bukanlah bersifat pribadi, melainkan kolektif atau komunal. Durkheim bahkan berkata lebih jauh lagi, kepemilikan yang bercorak komunal itu merupakan hal yang sakral. Suku secara keseluruhan adalah pemilik dari barang-barang yang ada. Memang secara *de facto* individu-individu tertentu dalam suku menguasai barang-barang tertentu. Ini tidak masalah sejauh mereka memanfaatkannya dengan mempertimbangkan kesejahteraan seluruh warga suku. Jadi konsep kepemilikan pribadi yang belakangan ini mulai menguasai kehidupan bermasyarakat menurut Emil Durkheim adalah ide yang melenceng dari pengertian *publik*, bahkan menghancurkan paham tentang yang sakral.

---

<sup>11</sup> Eben Nuban Timo, *Foni Bil Metan. Kemitraan Israel, Gereja dan Agama-Agama dalam Sebuah Mitos dari Timor* (Maumere: Penerbit Ledalero. 2007), 96.

<sup>12</sup> Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion* (Jogjakarta: Penerbit IRCiSoD. 2011), 136-7.

Solidaritas sosial karena itu adalah hal yang sangat diutamakan dalam menjaga langgengnya fakta sosial yang bernama masyarakat sebagai yang terlahir dari kesepakatan. KKN di Indonesia berpotensi menghancurkan kehidupan bangsa karena memiliki dua karakter negatif tadi, yakni corak sosial (yang bersifat inklusif untuk kasus Indonesia yang multi etnis) dari kepemilikan digantikan dengan corak individu (sebatas pada klan atau suku tertentu). KKN juga memporak-porandakan paham tentang yang sakral. Dalam hal korupsi misalnya, hancurnya paham tentang yang sakral nampak dalam hal korupsi dalam pembuatan buku nikah dan juga biaya percetakan kitab suci.

Secara teologis kristen, faktor *keempat*, KKN terjadi karena ketidak-mampuan manusia (para pelaku) untuk mengenal diri sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*imago dei*). Apakah artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu? Dalam buku Dogmatik Masa Kini, Van Niftrik – Boland mencatat dua arti.<sup>13</sup>

*Pertama*, manusia ada dalam hubungan dengan Allah. *Kedua*, manusia ada dalam hubungan dengan sesama. Emil Brunner benar waktu dia berkata, manusia sebagai gambar Allah berarti manusia adalah makhluk yang *being for other* (ada untuk yang lain). Dengan kata lain para pelaku KKN gagal untuk menampilkan diri sebagai *homo homini homo (socius)*, manusia ada bagi orang lain. Mereka lebih memilih menjadi manusia sebagai gambar serigala, *homo homini lupus*.

Secara religius, (yakni sebuah tinjauan keagamaan), KKN terjadi karena penghayatan kita akan iman dan etika belum berada di bawah satu atap. Dalam agama kita kenal apa yang disebut *credenda* (yakni hal-hal yang diyakini, diimani dan diamini). Dalam *credenda* kita berdiri di hadapan Allah untuk menyaksikan dan memuliakan perbuatan Allah bagi kita. Selain itu ada juga apa yang disebut *agenda*. Ini adalah salah satu sisi dari agama yang tidak bisa dipisahkan dari *credenda*. Dalam agenda kita berpaling kepada sesama manusia untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, mulia dan agung, berdasarkan apa yang kita diyakini, diimani dan diamini.

Nah, dalam praktek hidup beragama, *credenda* dan *agenda* kita ternyata belum berada di bawah satu atap. *Credenda* kita baik, sangat baik, bahkan baik sekali. Orang

---

<sup>13</sup> G. C. Van Niftrik – B. J. Boland, *Dogmatika Masa Kini* (Jakarta : PK Gunung Mulia 1958), 107.

Indonesia, teristimewa para pejabatnya adalah orang-orang religius. Pidatonya, tutur katanya, penuh dengan ayat-ayat suci. Bahkan mereka rajin mengunjungi tempat ibadah, posisi duduknya biasa paling depan. Mereka jadi yang pertama dalam kesalehan. Tetapi *agenda* hidupnya belum religius.<sup>14</sup> Mereka menyembah Allah pada hari ibadah (Jumat, minggu, dll), dan melayani mammon pada hari-hari kerja. Inilah manusia Indonesia. Mereka hanya beragama tanpa mentaati hukum-hukum, atau mereka hanya memperhatikan hukum-hukum tanpa peduli dengan Allah.

Maraknya parktek KKN di Indonesia memperlihatkan bahwa manusia Indonesia, terutama para pejabatnya barulah hidup sebagai manusia yang *having religion*. Mereka belum sampai pada taraf manusia yang *being religius*. Ada sesuatu yang salah dalam hal *image* mereka tentang Allah. Saya akan kembali kepada pokok ini.

Masih dalam hubungan dengan aspek keagamaan, fenomena KKN juga menunjukkan bahwa manusia Indonesia sekarang sedang mengalami krisis keteladanan. Kita telah kehilangan figur-figur yang bisa diteladani dan dicontohi. Banyak pejabat yang selama ini dianggap sebagai tokoh-tokoh panutan ternyata tidak lebih baik hidupnya dari para penjahat. Bedanya ialah mereka adalah pelaku-pelaku kejahatan yang mengenakan dasi dan safari.

Tokoh-tokoh besar dalam agama: Yesus Kristus, Muhammad, Krisna, dan Sidarta Gautama yang menjadi inspirator umat. Walaupun ajaran mereka mulai tidak lagi mereka dijadikan panutan hidup. Mengapa? Lihat saja siapa para pelaku KKN. Mereka bukan tidak kenal dan tidak mengamini ajaran rasul-rasul tadi. Tapi mengapa mereka korupsi, berkolusi dan melakukan nepotisme? Karena, mereka hanya menggunakan nama tokoh-tokoh itu sebagai simbol status saja, bukan tokoh-tokoh teladan hidup. Agama para pelaku korupsi ternyata baru sebatas simbol. Agama belum menjadi nilai yang mengarahkan kehidupan pribadi warga negara. Agama di Indonesia baru ada sampai ke tahap pemanis bibir. Ia belum menjadi agama hati nurani. Agama bibir, bukan agama hati.

Agama seperti itu nyata hanya dalam hal-hal yang kelihatan: pakai kalung salib, kerudung, toga dan jubah putih agama, tetapi hati tidak disalibkan, nafsu tidak

---

<sup>14</sup> Bandingkan juga Johanis Haba, "Korupsi, Moralitas dan Karakter Beragama," *Jurnal Teologi Sola Experientia*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2013, Jakarta, 2013, 112.

dikerudung dan hidup tidak mengenakan jubah kekudusan. Inilah cara orang Farisi dan ahli Taurat beragama. Yesus yang adalah teladan etis hidup orang kristen menggambarkan kehidupan seperti itu ibarat kuburan. Di luarnya dicat bersih, di dalamnya tulang yang bau busuk.

### 3. Akibat-akibat KKN

Dari aspek ekonomi pengaruh KKN tentu saja negatif bagi investasi (Brunetti, 1995), memperbesar resiko dan ketidak-pastian bagi investor dan masyarakat serta kualitas mutu pelayanan kepada masyarakat (Getz dan Volkema, 2001). Misalnya, seorang yang diterima bekerja dalam satu lembaga (PNS, Polisi, Tentara, atau apa saja) karena hasil suap, penghayatan yang bersangkutan akan tugasnya sebagai abdi negara abdi masyarakat akan sangat rendah. Sebab dia yang sudah rugi pada awal karirnya cenderung untuk menutupi kerugian itu dengan cara apapun, termasuk KKN.

Menyangkut masalah ketidak-pastian, KKN membuat semua penilaian obyektif atas, prestasi serta ketrampilan yang dimiliki seseorang tidak bisa dijadikan jaminan sukses. Ini berakibat, orang menjadi malas berusaha, dan kehilangan motivasi untuk berprestasi. Sebab ujung-ujungnya seleksi penerimaan, kelulusan, atau pemberian jabatan bukan atas dasar penilaian karya dan prestasi, melainkan KKN.

Dari segi kultur, korupsi berakibat buruk pada etika (Vitell, Nwachukwu, 1993). Nilai-nilai tentang yang baik dan jahat, benar-salah direduksi, bahkan ditukar dengan jumlah bilangan rupiah yang dijadikan uang *suap*, atau tafsiran yang dibuat-buat terhadap undang-undang. Tepatlah apa yang dikatakan Jakob Sumardjo dalam Kompas sebagaimana dikutip Rm. Emanuel Nuwa: "Kitab undang-undang sering tak terbaca dengan benar ketika setumpuk uang menggantung di jubah keadilan."<sup>15</sup>

Ini nampak umpamanya dalam contoh berikut. Ada pejabat yang ditangkap tangan berjudi. Ada barang bukti berupa uang puluhan juta. Tetapi si pelakunya tidak ditahan. Alasannya, judi yang mereka lakukan bukan pekerjaan pokok. Padahal rakyat miskin yang berjudi dengan taruhan puluhan ribu, langsung dijeblos dalam penjara karena perbuatan yang bersangkutan salah, dan berpotensi merusak moral bangsa.

---

<sup>15</sup> Emanuel Nuwa, *Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Agama Katolik*, dalam: Daniel Nuhamara & Irene Ludji, *Prosiding Studium Generale*. Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Agama-Agama Serta pencegahannya (Salatiga: Fakultas Teologi universitas Kristen Satya Wacana. 2014), 41.



Dari segi sosial, KKN merupakan gejala dari matinya solidaritas sosial yang merupakan hal paling utama dalam isi kontrak sosial yang menjadi cikal-bakal terbentuknya satu masyarakat. Dalam taraf awal masyarakat yang dinodai oleh praktek KKN masih hidup bersama, dalam satu rumah tetapi mereka tidak lagi hidup *bersesama*, yakni tidak ada lagi sikap peduli satu terhadap lain. Kalau hal itu dibiarkan terus tanpa perhatian maka mereka tidak lagi akan hidup *bersama*, di bawah satu atap melainkan akan hidup *bertetangga*, masing-masing membuat rumah sendiri. Inilah desintegrasi kehidupan bernegara di Indonesia yang oleh Kadarman akan terjadi jika korupsi terus dipraktekkan.<sup>16</sup>

Dari aspek religius dan teologis KKN tentu adalah perbuatan tercela, sebuah praktek yang hanya bisa dilakukan oleh manusia yang bukan lagi manusia. "Menjadi manusia," demikian kata Paul Tillich, "artinya mengajukan pertanyaan tentang keberadaan diri manusia dan menjalani hidup seturut dengan jawaban yang diberikan atas pertanyaan itu. Dan sebaliknya, menjadi manusia artinya menerima jawaban terhadap pertanyaan tentang keberadaan diri manusia dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang diberikan."<sup>17</sup>

Kutipan dari Paul Tillich hendak menegaskan bahwa menjadi manusia artinya hidup dari apa yang didengar atau melakukan firman yang diterima dari Allah. Para pelaku KKN tidak berbuat demikian. Mereka mengajukan pertanyaan kepada Allah tentang keberadaan diri mereka sebagai manusia tetapi tidak mau menjalani hidup seturut jawaban yang diterima. Orang-orang seperti ini adalah munafik. Bermuka dua, berhati singa. Inilah manusia yang kemanusiaannya pecah. Pecahnya kemanusiaan itu berakibat dia tampil sebagai manusia bermuka-dua: kejam terhadap orang kecil, ramah dan patuh terhadap orang besar; tunduk dan menyesal di hadapan Allah, tinggi hati dan rakus melihat harta benda sesamanya. Benarlah apa yang dikatakan A. Kadarman bahwa mentalitas para pelaku KKN adalah moralitas yang amburadul atau yang oleh Carroll dan Buchholz disebut *immoral management*.<sup>18</sup>

#### 4. Upaya Penanganan KKN

Berdasarkan hasil investigasi di atas, dan dengan memperhatikan KKN sebagai

---

<sup>16</sup> A. Kadarman, *Antisipasi Desintegrasi Negeri Ini* (Jakarta: PT. Forum Media Utama. 2008), 73.

<sup>17</sup> Paul Tillich, *Systematic Theology I* (London: SCM Press Ltd. 1978), 8.

<sup>18</sup> A. Kadarman, *Antisipasi Desintegrasi Negeri Ini* (Jakarta: PT. Forum Media Utama. 2008), 80.

sebuah fenomena yang *menggurita*, penanggulangan terhadap KKN harus menjadi komitmen bersama semua komponen bangsa. Perjuangan untuk memberantas KKN tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri dan bersifat eksternal saja. Semua komponen bangsa harus melihat KKN sebagai sebuah skandal. Atas dasar itu perlu disusun program bersama untuk mulai menggikis skandal itu dari kehidupan bersama.

Ini berarti KKN tidak bisa diberantas hanya dengan menaikkan gaji PNS dan UMR (upah minimum rata-rata). Seiring dengan itu *law enforcement* bagi para pelaku KKN juga perlu ditegakkan. Untuk itu para hakim, jaksa dan polisi sebagai benteng terakhir dari *law enforcement* harus memiliki integritas diri dan kredibilitas moral yang kokoh. Kematian hati nurani ketiga komponen ini harus dibangkitkan kembali.

Ini berhubungan dengan pola rekrutmen polisi, jaksa dan hakim. Persyaratan-persyaratan penerimaan pegawai negeri sipil, polisi, jaksa, dan hakim yang selama ini hanya menekankan persyaratan fisik harus ditambahkan dengan kualifikasi moral dan spiritual. Ini tidak hanya cukup dengan sekedar melihat nilai pelajaran agama dan Pancasila yang tertera di ijasah.

Ujung-ujungnya format pendidikan formal di negara kita perlu mengalami reformasi yang signifikan. Sesungguhnya ada tiga tujuan dari pelaksanaan pendidikan: *academic formation*, *spiritual formation* dan *skill building capacity*. Di Indonesia pendidikan masih hanya sebatas pada pembentukan akademik. Anak-anak yang dianggap berprestasi, ranking dalam kelas adalah mereka yang nilai akademiknya di atas rata-rata teman sekelas, tidak peduli bagaimana kualitas mental dan moral yang bersangkutan. Aspek ini juga harus mendapat perhatian serius.

Di sini tugas departemen pendidikan dan departemen agama bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan menjadi penting, yakni menyediakan format, kurikulum dan materi pendidikan agama yang kena-mengena dengan pembentukan spiritual manusia Indonesia untuk dipedomani di sekolah-sekolah dan juga keluarga-keluarga. Jadi jangan hanya menekankan pada aspek formal liturgis melulu, sebab di situ bisa terjadi korupsi. Urus juga pendidikan akhlak manusia. Jadi pendidikan kita harus berdimensi humanis, menekankan prinsip dialog (bukan komando) dan berbasis budaya lokal.

Akhirnya, korupsi tidak bisa dibasmi, tetapi dapat diminimalisir. Salah satu caranya ialah melalui penyederhanaan prosedur pengurusan keperluan-keperluan publik. Harus ada kesediaan memangkas birokrasi yang berbelit dan bertele-tele. Tindakan ini disebut debirokratisasi. Debirokratisasi meminimalkan terjadinya punggutan liar di meja pertama, loket kedua, dst. Menyederhanakan prosedur ini juga sejalan dengan nilai agama. Kasih itu sederhana, kata Paulus.

## 5. Korupsi dan our God-view

Mengakhiri tulisan ini perkenalkan saya masuk dalam janji saya, membahas hubungan antara korupsi dan rusaknya gambaran kita tentang Allah. Paul Borthwick dalam bukunya berjudul *Six Dangerous Questions* mengatakan sebagai berikut: *our worldview determines how we live*.<sup>19</sup> Saya ingin merumuskan pernyataan Borthwick secara baru: *our godview determines how we live*. Pandangan kita tentang Allah mempengaruhi sikap dan tindakan kita sehari-hari. Orang boleh berdoa menolak dan mengutuk KKN tetapi ada banyak alasan orang-orang yang berdoa itu melakukan KKN. Salah satunya, menurut pendapat saya berhubungan dengan gambaran mereka tentang Allah. Bagian ini dimaksud untuk menjelaskan hubungan antara korupsi dan gambaran tentang Allah.

*Theos* (Yunani) *Deus* (Latin) adalah dua istilah yang banyak dipakai dalam percakapan orang-orang beragama tentang Allah. Berbicara tentang Allah, kata John Hick membawa kita pada dua kawasan: Penyangkalan akan adanya Allah dan Peneguhan akan adanya Allah.<sup>20</sup>

Dalam kawasan pertama ada empat sikap atau paham tentang Allah, yakni: 1. *Atheisme*. Ini sebuah paham yang berpendapat bahwa tidak ada Allah. 2. *Agnostikisme* (tidak tahu) tentang Allah. Kaum ini mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki alasan yang cukup dan dapat diterima, baik untuk menolak maupun untuk mengakui keberadaan Allah. Karena itu manusia tidak bisa beranggapan bahwa Allah itu ada atau Allah itu tidak ada. 3. *Skeptisme* yakni kaum yang meragukan segala hal yang berhubungan dengan Allah. 4. *Naturalisme*. Kaum yang berpendapat bahwa manusia

---

<sup>19</sup> Paul Borthwick, *Six Dangerous Questions To Transform your View of the World* (Illinois: Inter Varsity Press. 1996), 73.

<sup>20</sup> John. H. Hick, *Philosophy of Religion* (New Jersey: Prentice Hall. 1963), 7.

dengan segala aspek atau elemen hidupnya adalah bagian integral dari alam. Yang namanya Allah itu tidak ada atau Allah itu tak lain dari alam.

Jelas bahwa para koruptor di Indonesia tidak ada dalam kawasan ini. Mereka justru adalah orang-orang beragama, ada yang duduk di depan, ada yang di tengah dan ada juga yang di barisan belakang waktu ibadah. Tidak mungkin orang yang hidup dalam penyangkalan akan Allah ambil bagian dalam akta penyembahan kepada Allah.

Dalam kawasan kedua, yakni yang menegaskan adanya Allah sekurang-kurangnya ada tujuh paham. 1. *Deisme*. Allah itu ada tapi sudah lama sekali dia pensiun. Dulu sekali, yakni sebelum ada segala sesuatu hanya Allah saja yang ada. Lalu Allah ini menciptakan segala yang ada. Setelah itu Allah ini pergi. Ia pensiun alias beristirahat. Ia membiarkan ciptaan-Nya melanjutkan keberadaannya sendiri. Bumi dan ciptaan bisa bereksistensi tanpa campur tangan Allah karena Allah melengkapi segala sesuatu dengan hukum-hukum yang tetap pada saat diciptakan. Jadi ciptaan saat ini dapat hidup tanpa Allah.

2. *Theisme*. Allah ada tapi tidak dapat diketahui seperti apa wujud dan rupanya. Keberadaan Allah bersifat abstrak dan tak terpahami. Manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang Allah kehendaki. Allah yang tidak berwajah dan berupa, membuat kita sulit mengetahui apa reaksinya melihat berbagai kelakuan kita yang keliru atau salah, misalnya saat kita melakukan korupsi.

3. *Polytheisme* (ada banyak Allah). Allah itu ada dan berwujud (berpribadi). Tapi Allah itu banyak. Allah-Allah yang banyak itu mengurus hal-hal yang berbeda bagi keberlangsungan hidup ciptaan. Ada Allah yang mengurus laut, ada Allah yang mengurus hujan, dst, Jadi ada pembagian tugas dari Allah-Allah yang banyak itu. Bahkan sering Allah-Allah itu saling cemburu dan berperang. Allah yang disembah dalam ibadah ternyata lain dari Allah yang ada di tempat kerja saat mengurus proyek atau anggaran pembangunan.

4. *Henotheisme*. Ada banyak Allah tetapi di antara Allah-Allah yang banyak itu ada satu Allah yang dipilih untuk ditetapkan sebagai Allah untuk disembah oleh suku atau kelompok tertentu. Tentu pilihan itu didasarkan pada hubungan yang khusus antara si ilah dengan penyembahnya, mungkin karena totemisme atau yang sejenisnya.

5. *Pantheisme* (Allah ada dalam segala sesuatu). Allah itu ada dan mendiami segala sesuatu. Atau dalam setiap objek ciptaan ada unsur atau elemen ilahi. Kehadiran Allah dalam obyek-obyek itu yang bersifat substansial atau mendasar. Artinya Allah hadir begitu rupa dalam satu obyek sehingga obyek itu berkarakter ilahi. Orang-orang primitif atau suku-suku tradisional percaya bahwa di pohon, batu, gunung, dan tanah ada roh. Kalau manusia menebang pohon atau merusak batu secara semena-mena akan membuat roh yang mendiami batu itu marah, lalu timbullah bencana yakni pembalasan dari roh yang marah karena diperlakukan tidak hormat. Banyak ritus siklus pertanian yang diadakan oleh masyarakat tradisional bersumber dari paham pantheisme. Sebelum panen madu, dibuat ritus atau ibadah yang intinya adalah minta izin pada roh yang ada pada madu dan lebah agar tidak tersinggung atau marah.

*Pantheisme* nampaknya sejalan dengan kesaksian kitab-kitab suci agama wahyu (Yahudi, Kristen, Islam). Tetapi sebenarnya tidak demikian. Pantheisme mengajarkan kehadiran Allah dalam segala sesuatu begitu rupa sehingga tidak ada lagi batas antara kedirian ciptaan dan kedirian Allah. Kehendak ciptaan sama dengan kehendak sang pencipta.

Kitab-kitab suci yang diwahyukan Allah kepada umat beragama, secara khusus Alkitab, menegaskan bahwa Allah memang memenuhi segenap ciptaan. Tetapi ciptaan yang menjadi tempat kediaman Allah tetap ciptaan. Kehendak dan keputusannya tidak otomatis identik dengan kehendak dan keputusan Allah.

6. *Panentheisme* (segala sesuatu ada dalam Allah). Kenyataan ciptaan yang kasat mata ini bukanlah realita yang sebenarnya atau sesungguhnya. Ia adalah proyeksi atau emanasi dari keberadaan yang sebenarnya yang ada di dalam Allah. Apa yang ada sebenarnya hanyalah bayang-bayang dari realita yang ada di dalam Allah.

7. *Monotheisme*. Allah itu ada dan hanya satu. "*La illaha illah Allah.*" Allah yang satu-satunya itu adalah satu pribadi yang bermoral yakni mencintai kebaikan dan kebenaran serta menolak kejahatan dan kelaliman. Allah yang satu ini menghendaki dan menuntut ketaatan dan penyerahan diri yang utuh dan total dari manusia.

Allah itu hanya satu. Semua ada yang lain bukan Allah. Mereka diciptakan oleh Allah tetapi tidak dapat disetarakan atau dipersekutukan dengan Allah. Allah yang hanya

satu-satunya ini tak terbatas dan tak berawal. Ia dipahami sebagai pribadi yang berkomunikasi. Allah digambarkan sebagai yang mencintai keadilan dan kebenaran (Amos 5:24), jijik terhadap kelaliman dan tipu daya. Allah ini memiliki wajah atau muka yang jelas. Itu sebabnya orang-orang percaya sering berseru agar Allah mengarahkan wajahNya (Mz. 4:7) atau tidak menyembunyikan wajahNya dari mereka (Mz. 10:11, 13:2, dst).

Paham *monotheisme* menegaskan bahwa Allah adalah pribadi yang berkuasa dan sumber segala kebaikan. Keallahannya berlaku atas seluruh realita kehidupan. Jadi tidak ada satupun kawasan atau bidang hidup yang berada di luar jangkauan kuasa dan kehadiran Allah. Seluruh aspek hidup manusia yang kasat mata maupun tidak kasat mata berada dalam relasi dengan Tuhan. Paham tentang Allah inilah yang dianjurkan dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam.

Kita sudah memeriksa gagasan atau paham-paham yang berkembang dalam kawasan umat beragama tentang keberadaan Allah. *Our worldview determines how we live*. Dihubungkan dengan praktek korupsi yang juga marak di kalangan orang-orang beragama, bahkan yang kerap datang kepada Allah dengan doa: “Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya”, kita mendapat kesan bahwa *godview* mereka mengalami distorsi.

Dari ketujuh corak *godview* di atas paham *monotheisme* yang diajarkan di dalam Alkitab, juga dalam kitab suci agama *monotheisme* lain: Yahudi dan Islam. Allah seperti ini jugalah yang memperkenalkan diri dalam Kristus.

Para pelaku korupsi, ternyata tidak mengenal Allah yang *monotheistik*, Allah yang hidup dan berkehendak dan menentang semua kelaliman dan tipu daya. Allah yang mereka sembah sesungguhnya adalah berhala, ciptaan mereka. Mulut mereka menyapa Allah yang hidup dan kudus, tetapi hati mereka mengarah kepada berhala-berhala.

## Daftar Pustaka

Borthwick, Paul. *Six Dangerous Questions To Transform your View of the World*. Illinois: Inter Varsity Press, 1996.

Haba, Johanis. "Korupsi, Moralitas dan Karakter Beragama." Dalam: *Jurnal Teologi Sola Experientia* Vol. 1 No. 2, Oktober 2013. Jakarta, 2013.

Hick, John. H. *Philosophy of Religion*. New Jersey: Prientice Hall, 1963.

Kadarmanta, A. *Antisipasi Disintegrasi Negeri Ini*. Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2008.

Kartodirdjo, *Korupsi dan Moralitas Bangsa*. Yayasan Obor, 1981.

Mujiburrahman. *Sentilan Kosmopolitan*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2013.

Niftrik, G. C. Van - B. J. Boland. *Dogmatika Masa Kini*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1958.

Nuhamara, Daniel & Irene Ludji. Prosiding Studium Generale. *Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Agama-Agama Serta pencegahannya*. Salatiga: Fakultas Teologi universitas Kristen Satya Wacana, 2014.

Pos Kupang: Suara Nusa Tenggara Timur. 26 Januari 2008.

Robertson, Christopher J. & Andrew Watson. *Korupsi dan Perubahan Nilai*, 1999.